



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

06 November 2017

Korupsi Jalan Lintas Aru, Empat Kali Berkas Tersangka Bolak Balik Jaksa

Ambon - Polres Aru belum juga mampu membereskan kasus dugaan korupsi proyek jalan lintas Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2015. Sudah empat kali berkas PPK Irwan Rahman, tersangka kasus ini bolak balik jaksa.

Berkas Irwan Rahman kembali dilimpahkan penyidik Polres Aru kepada jaksa, Kamis (3/11) sore, yang diterima Kasi Pidsus Kejari Aru, Eka Putra Polimpong.

Kapolres Pulau Aru, AKBP Adolof Bormasa mengklaim, semua petunjuk JPU sudah dipenuhi. "Untuk berkas tersangka sudah dibalik lagi ke jaksa. Petunjuk dalam P-19 sudah dilengkapi oleh penyidik sehingga dikembalikan untuk diteliti," kata Bormasa yang dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (3/11).

Kasi Pidsus Kejari Aru, Eka Putra Polimpong yang dikonfirmasi juga mengaku, berkas tersangka baru diterima kembali dari penyidik.

"Benar berkas tersangka baru saya terima di meja saya. Selanjutnya saya harus meneliti dulu apakah petunjuk yang diberikan kepada penyidik sudah terpenuhi seluruhnya atau belum," ujarnya.

Polimpong enggan menjelaskan soal petunjuk yang diberikan kepada penyidik. Ia hanya mengatakan, berkas tersangka akan diteliti, apakah sudah sesuai petunjuk atau belum. "Soal tersangka baru nanti tanyakan ke polisi. Tetapi untuk saat ini masih satu tersangka yang kini di tangan jaksa," jelasnya.

Seperti diberitaka, proyek jalan lintas ini dibiayai oleh Alokasi Dana Khusus dan terdiri dari tiga paket. Jalan yang menghubungkan Desa Taberfane-Hokmar senilai Rp 3 miliar. Kemudian jalan Desa Luter-Rebi Rp. 2,842 miliar dan jalan yang menghubungkan Desa Hokmar-Luter senilai Rp. 1,956 miliar.

Paket proyek ini dikerjakan oleh Jhon Kotanubun. Malah pekerjaan jalan Desa Hokmar-Luter senilai Rp. 1,956 miliar tak melalui proses lelang. PPK Irwan Rahman menunjuk langsung Kotanubun dengan perusahaannya CV Fanni Prima untuk mengerjakan proyek itu.

Kendati melalui proses lelang, namun pekerjaan proyek jalan Desa Taberfane-Hokmar dan Luter-Rebi juga dimenangkan oleh Kotanubun. Tetapi dengan perusahaan berbeda, yaitu Fa. Victoria.

Selain dugaan ketidakberesan dalam lelang, jalan yang menghubungkan Desa Luter-Rebi diduga tidak dikerjakan. Padahal anggaran dicairkan 100 persen.

Kendati bukti-bukti kuat, namun Polres Kepulauan Aru takut menjerat Jhon Kotanubun sebagai tersangka. Alasannya, kontraktor yang mengerjakan proyek jalan lintas Aru Selatan Utara ini sudah tua dan dalam kondisi sakit-sakitan.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

“Untuk pihak ketiga atau kontraktor hingga kini belum ditetapkan tersangka karena yang bersangkutan sudah usia lanjut dan sakit-sakitan, kita takut jangan sampai kita tetapkan sebagai tersangka terjadi hal yang tidak diinginkan maka kita yang bertanggung jawab. Ini pertimbangan sisi kemanusiaan,” kata Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Adolof Bormasa saat dikonfirmasi *Siwalima*, Selasa (26/9) di ruang kerjanya.

Bormasa mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara bersama Kejari Aru agar secepatnya berkas PPK Irwan Rahman yang telah ditetapkan sebagai tersangka dirampungkan. “Kita sangat apresiasi atas dukungan pihak Kejari Aru untuk secepatnya berkas tersangka dapat ditingkatkan statusnya menjadi P21, sehingga secepatnya juga dapat disidangkan,” ujarnya.

Bormasa mengatakan, penetapan PPK Irwan Rahman sebagai tersangka akan membuka pintu untuk menjerat tersangka lainnya. “Dengan ditetapkannya satu tersangka ini akan membuka jalan untuk munculnya tersangka-tersebut baru lainnya,” tandasnya.

Bormasa menegaskan, pihaknya serius dan tidak main-main dalam penanganan kasus ini. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir. “Tidak ada yang perlu diragukan oleh masyarakat. Untuk sementara ini tersangka, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru yang nantinya menyusul,” tandasnya lagi.

Bormasa sebelumnya juga mengatakan hal sama. Ia memberikan sinyal kalau nantinya ada tersangka baru dalam proyek senilai Rp 7 miliar lebih itu. “Sementara ini baru satu tersangka yaitu PPK, proses hukum masih jalan, sehingga tidak menutup kemungkinan ada tambahan tersangka,” kata Bormasa, kepada wartawan, Rabu (20/9) di Aru.

Selain PPK, kata Bormasa, ada pihak lain yang berperan penting dalam proyek bermasalah ini. Misalnya, kontraktor, pengawas dari Dinas PU maupun konsultan pengawasan dan lainnya.

“Ada banyak yang terkait sebelum dibuat progress pekerjaan, hingga diterbitkan SPM yang dibuat oleh bendahara Lauda Labok dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PU ketika itu, Dominggus Lengam untuk pencarian anggaran 100 persen. Jadi tidak menutup kemungkinan ada tambahan tersangka. Bisa saja itu kontraktor, konsultan pengawas atau lainnya,” ungkapnya. **(S-27)**

http://www.siwalimanews.com/post/empat_kali_berkas_tersebut_bolak_balik_jaksa